



2025

SURAT KELUAR

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center: +62 813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : UM.209/6/20/STJ/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber

Jakarta, 24 Juni 2025

Yth. Direktur Utama Jasa Marga

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mencanangkan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang semestinya berlaku secara penuh sejak beberapa tahun terakhir. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi pengawasan, kesiapan industri angkutan barang, serta pemahaman publik.

Mengacu pada hal tersebut, Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan bermaksud melaksanakan kegiatan penyampaian informasi khususnya kepada rekan-rekan media melalui kegiatan *press background* terkait beragam perspektif dari regulator, pelaku usaha, serta pengelola jalan tol. Melalui kegiatan ini, awak media diharapkan dapat menerima informasi secara komprehensif dan utuh untuk mengedukasi masyarakat, membuka dialog konstruktif, serta memperkuat dukungan publik terhadap penegakan kebijakan Zero ODOL melalui pemberitaan yang tersampaikan secara proporsional.

Adapun kegiatan *press background* rencananya akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : 16.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aroem Resto & Café Jakarta
Jl. Abdul Muis No.14, Petojo Selatan, Jakarta Pusat
Moderator : Ketua Forum Wartawan Perhubungan Ichsan Amin

Sehubungan dengan hal itu, dimohon kehadiran Saudara untuk dapat menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut bertindak selaku narasumber Ketua Tim Pemberitaan dan Hubungan Pers Media BKIP (Sdr. Haryadi - 082299402587).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Erni Titis Dewi
NIP. 19760710 200604 2 001

"Tingkatkan Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III RANAI - NATUNA**

Jl. Adi Sucipto Tanjung Pasir
Kode Pos : 29783

Telepon : 08117008324

Email : bandara_ranai@dephub.go.id
ranai.airport@gmail.com

Nomor : AU.001/ 307 /IV/UPBU-RN/2025
Klasifikasi :
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : Laporan Bulanan Data LLAU Bandar Udara Ranai

Natuna, 15 April 2025

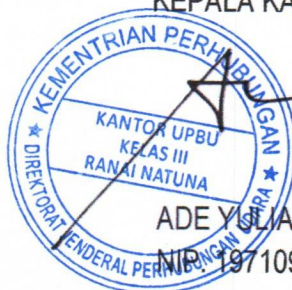
Yth. **Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna**

Mendasari Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna Nomor : B-14/2103/VS.330/2024
Tanggal 06 Januari 2025 Perihal Permintaan Data Angkutan Udara 2025.

Berkenaan dengan dasar tersebut di atas, Bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Bulanan Lalu Lintas Angkutan Udara Periode Bulan Maret 2025 di Bandar Udara Ranai sebagaimana laporan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR



ADE YULIANA

NIP. 19710905 199301 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Sekertaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Direktur Angkutan Udara;
4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Natuna.

Lampiran Surat Kepala Kantor UPBU Kelas III Ranai
 Nomor : AU.001/ 207 /IV/UPBU-RN/2025
 Tanggal : 15 April 2025

LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA MENURUT BANDARA ASAL / TUJUAN
BANDARA/MASKAPAI : RANAI - NATUNA / WINGS AIR

Mar-25

No.	Bandara Asal dan Tujuan	Pesawat Terbang		Penumpang			Barang (KG)		Bagasi (KG)		Pos/Paket (KG)	
		Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Transit	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar
1.	BTH - NTX	IW-1271	IW-1270	8	41	-	0	867	74	244	-	-
2.	NTX - BTH	IW-1271	IW-1270	37	52	-	0	222	142	75	-	-
3.	BTH - NTX	IW-1271	IW-1270	30	35	-	0	62	117	97	-	-
4.	NTX - BTH	IW-1271	IW-1270	54	31	-	0	436	156	184	-	-
5.	BTH - NTX	IW-1271	IW-1270	54	29	-	0	383	123	39	-	-
6.	NTX - BTH	IW-1271	IW-1270	34	12	-	0	809	231	58	-	-
7.	BTH - NTX	IW-1271	IW-1270	12	20	-	0	230	48	152	-	-
8.	NTX - BTH	IW-1271	IW-1270	15	23	-	0	523	36	63	-	-
9.	BTH - NTX	IW-1271	IW-1270	13	25	-	0	682	29	152	-	-
10.	NTX - BTH	IW-1271	IW-1270	16	16	-	0	503	13	74	-	-
TOTAL / JUMLAH		10	10	273	284	-	0	4717	969	1138	-	-

LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA MENURUT BANDARA ASAL / TUJUAN
BANDARA/MASKAPAI : RANAI - NATUNA / NAM AIR

Mar-25

No.	Bandara Asal dan Tujuan	Pesawat Terbang		Penumpang			Barang (KG)		Bagasi (KG)		Pos/Paket (KG)	
		Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Transit	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar
1	BTH - NTX NTX - BTH	IN-037	IN-036	79	134	-	500	322	744	1865	-	-
2	BTH - NTX NTX - BTH	IN-037	IN-036	129	121	-	750	270	1418	1743	-	-
3	BTH - NTX NTX - BTH	IN-037	IN-036	130	125	-	1212	1199	1528	1697	-	-
4	BTH - NTX NTX - BTH	IN-037	IN-036	136	124	-	500	700	1481	1657	-	-
5	BTH - NTX NTX - BTH	IN-037	IN-036	134	132	-	820	642	1555	1923	-	-
6	BTH - NTX NTX - BTH	IN-037	IN-036	132	129	-	657	800	1374	1769	-	-
7	BTH - NTX NTX - BTH	IN-037	IN-036	129	124	-	892	838	1409	1763	-	-
8	BTH - NTX NTX - BTH	IN-037	IN-036	132	134	-	531	601	1367	1699	-	-
TOTAL / JUMLAH		8	8	1001	1023	-	5862	5372	10876	14116	-	-

KEPALA KANTOR



ADE YUNIANA
NIP. 19710905 199301 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center: +62 813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : *IP. 202 / 2 / 2 / STJ / 2025*
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Press Tour

Jakarta, *23* Juli 2025

Yth. Redaktur CNBC

Kementerian Perhubungan terus berupaya mengembangkan layanan angkutan perkotaan yang efisien, aman, nyaman, serta terintegrasi di berbagai moda melalui layanan *Buy The Service* (BTS), feeder, hingga Bus DAMRI. Salah satu kota yang sudah melaksanakan layanan angkutan modern dan terintegrasi adalah Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Mengacu pada hal tersebut, Biro Komunikasi dan Informasi Publik bermaksud mengundang 1 (satu) orang wartawan CNBC untuk mengikuti kegiatan Press Tour di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu sampai dengan Jumat, 30 Juli-1 Agustus 2025. Melalui kegiatan ini, diharapkan awak media dapat menerima informasi yang komprehensif terkait transportasi perkotaan di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Untuk konfirmasi nama wartawan yang ditugaskan dan informasi lebih lanjut, bertindak sebagai narahubung Nadha (085747968667). Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Ernita Titis Dewi
NIP. 19760710 200604 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center : +62 813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : 19.101/1/5/STJ/2025

Jakarta, 29 Juli 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pengambilan Gambar

Yth. Direktur Utama Transjakarta

Dalam rangka meningkatkan pemahaman publik terkait upaya kolaboratif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan angkutan umum massal berbasis jalan di perkotaan yang andal, Biro Komunikasi dan Informasi publik Kementerian Perhubungan bermaksud melakukan penyusunan konten dalam bentuk *video series*. Selain sebagai media edukasi dan publikasi pemanfaatan angkutan umum massal, video ini juga bertujuan sebagai dokumentasi strategis yang menggambarkan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pengembangan sistem angkutan umum perkotaan. Rencananya, video akan terbagi ke dalam tiga episode yang dipandu oleh seorang *host*, dikemas secara informatif melalui narasi, wawancara narasumber, serta pengambilan gambar (*footage*) di beberapa lokasi. Salah satu lokasi pengambilan gambar direncanakan mencakup sarana dan prasarana Transjakarta, sebagai pionir pengembangan sistem angkutan massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk memberikan izin kepada tim kami melakukan pengambilan gambar di wilayah kerja yang Saudara pimpin, khususnya pada Koridor 1 rute Terminal Blok M – Kota, yang akan dilaksanakan pada Jumat s.d. Sabtu, 1 s.d. 2 Juli 2025. Untuk informasi lebih lanjut, narahubung kegiatan ini adalah Sdri. Destirani (HP: 0856-9237-8798).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Ermita Titis Dewi
NIP. 197607102006042001

"Tingkatkan Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center: +62 813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : UM.209/7/17/STJ/2025

Jakarta, 7 Juli 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Narasumber

Yth. General Manager Perum DAMRI Kantor Cabang Medan

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di sektor transportasi, khususnya pengembangan layanan angkutan perkotaan, Kementerian Perhubungan berencana melaksanakan kegiatan liputan dan *press tour* bersama media massa pada Senin sampai Rabu, 14-16 Juli 2025 di wilayah kerja Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Saudara untuk menjadi Narasumber wawancara terkait pengelolaan Bus DAMRI di wilayah Medan serta penyediaan data pendukung terkait operasional. Untuk komunikasi lebih lanjut, bertindak selaku narahubung kegiatan Saudara Oberlin melalui nomor *WhatsApp*: 0857 8085 3202.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Ernita Titis Dewi
NIP. 19760710 200604 2 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

"Tingkatkan Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3506006
FAX : (021) 3522338
SMS Center: +62 813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : IP. 202 / 2 / 4 / STJ / 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Press Tour

Jakarta, 23 Juli 2025

Yth. Redaktur Tribunnews

Kementerian Perhubungan terus berupaya mengembangkan layanan angkutan perkotaan yang efisien, aman, nyaman, serta terintegrasi di berbagai moda melalui layanan *Buy The Service* (BTS), feeder, hingga Bus DAMRI. Salah satu kota yang sudah melaksanakan layanan angkutan modern dan terintegrasi adalah Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Mengacu pada hal tersebut, Biro Komunikasi dan Informasi Publik bermaksud mengundang 1 (satu) orang wartawan Tribunnews untuk mengikuti kegiatan Press Tour di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu sampai dengan Jumat, 30 Juli-1 Agustus 2025. Melalui kegiatan ini, diharapkan awak media dapat menerima informasi yang komprehensif terkait transportasi perkotaan di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Untuk konfirmasi nama wartawan yang ditugaskan dan informasi lebih lanjut, bertindak sebagai narahubung Nadha (085747968667). Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Ernita Titis Dewi
NIP. 19760710 200604 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I JAWA BARAT

Gedung Terminal Leuwipanjang
Jl. Leuwipanjang Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat 40234

TELP : (022) 20287815

FAX. : (022) 20287815
Email : bptd_jawabarat@Kemenhub.go.id

Nomor : AJ.205/1/13/BPTD-Jabar/2025
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Permintaan Data Jumlah
Penumpang Jasa Transportasi

Bandung, 28 Agustus 2025

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 3489/ST.03/PPT tanggal 28 Juli 2025 perihal Permohonan Data Jumlah Penumpang Jasa Transportasi, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami sangat mendukung kegiatan BPS Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyusunan indikator makro ekonomi daerah khususnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang membutuhkan data jasa transportasi;
2. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat, kami hanya memiliki kewenangan dalam pengawasan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
3. Dengan demikian, kami hanya dapat memberikan dukungan data sesuai kewenangan, yaitu:
 - a. Data jumlah penumpang Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
 - b. Data jumlah kendaraan dari Perusahaan Otobus (PO) AKAP.
4. Untuk data terkait Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Angkutan Pariwisata, mohon dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan instansi atau pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan kedua jenis angkutan tersebut;
5. Data AKAP sebagaimana dimaksud pada butir (3), telah kami himpun dan dapat diakses melalui tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/13DPQbXvYuLdA-F5AptZtR3pv82Z9T8qx?usp=drive_link

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



Ferdy Trisanto Kurniawan, S.T., M.Si.
NIP. 19780201 200312 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Gubernur Jawa Barat;
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS IV KETAPANG**

Jl. Gajah Mada No. 542
Sukabangun, Delta Pawan
Ketapang, Kalimantan Barat
78851

Telp : (0534) 32337

Faks : (0534) 32337
Email : adpel.ketapang@yahoo.co.id
Ksopketpang.022@gmail.com
Homepage : hubla.dephub.go.id/ksopketpang

Nomor : UM.003/7/14/KSOP.KTG-2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Data

Ketapang, 13 Agustus 2025

Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

Menunjuk surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 500.1.2.1/1379/DISKETPAN-B, tanggal 1 Agustus 2025 hal Mohon Dukungan Data Pasokan Komoditas Bahan Pangan.

Sehubungan tersebut diatas, berikut kami sampaikan data bongkar dan muat barang komoditas pangan bulan Juli 2025 di Pelabuhan Ketapang sebagaimana data terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ketapang



Ditandatangani secara elektronik
DR. ALI AFENDI, S.SOS, MM
NIP 19800707 200604 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Gubernur Kalimantan Barat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

[illegible]

[illegible]

REKAP MUAT ARUS BARANG BERDASARKAN KOMODITI
TAHUN 2025

NO	URAIAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKTO	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BAHAN POKOK													
	Beras	-	-	-	-	-	-	-						-
	Gula Pasir	-	-	-	-	-	-	-						-
	Tepung Terigu	-	-	-	-	-	-	-						-
	Minyak Goreng	-	-	-	-	-	-	-						-
	Kacang2an	-	-	-	-	-	-	-						-
	Garam	-	-	-	-	-	-	-						-
	Jagung	-	-	-	-	-	-	-						-
	Kedele	-	-	-	-	-	-	-						-
2	Telur	-	-	-	-	-	-	-						-
	BAHAN STRATEGIS													
	Pupuk	-	883	-	-	-	-	-						883
	Semen	-	-	-	-	-	-	-						-
	Asbes	-	-	-	-	-	-	-						-
	Aspal	-	-	-	-	-	-	-						-
	Baja / Besi Beton	-	-	-	-	-	-	-						-
	Paku	-	-	-	-	-	-	-						-
	Seng	-	-	-	-	-	-	-						-
3	Tawas	-	-	-	-	-	-	-						-
	Kayu Gergajian	-	-	-	-	-	-	-						-
	Genteng	-	-	-	-	-	-	-						-
	Tepung Industri	-	-	-	-	-	-	-						-
	MIGAS													
	Oil	-	-	-	-	-	-	-						-
	Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-						-
	BBM	-	-	-	-	-	-	-						-
	Elpiji	-	-	-	-	-	-	-						-
4	NON MIGAS													
	Kopi	-	-	-	-	-	-	-						-
	Cpo	41.062	38.308	47.556	38.070	53.599	41.997	43.976						304.568
	Kernel	3.969	8.283	2.848	4.369	10.610	2.199	6.556						38.834
	Tepung Sagu	-	-	-	-	-	-	-						-
	Pasir Kuarsa	-	-	-	-	-	-	-						-
	Paping Block (Bataco)	-	-	-	-	-	-	-						-
	Tapioka	-	-	-	-	-	-	-						-
	Tepung Kanji	-	-	-	-	-	-	-						-
5	Mebel	-	-	-	-	-	-	-						-
	Mesin	-	-	-	-	-	-	-						-
	Kayu Lapis	-	-	-	727	-	50	-						777
	Makanan Ternak	-	-	-	-	-	-	-						-
	Tepung Beras	-	-	-	-	-	-	-						-
	Porselen	-	-	-	-	-	-	-						-
	Container Kosong 20 Fit (Teus)	448	150	297	358	192	342	427						2.214
	Container Kosong 40 Fit (Teus)	84	64	94	214	72	97	129						754
	BARANG TAMBANG													
6	Bauksit	-	-	-	4.399	14.664	-	18.987						38.050
	Pasir	-	-	-	-	-	-	-						-
	BARANG LAINNYA													
	Sayur-Sayuran	-	-	-	-	-	-	-						-
	Kendaraan	86	95	195	174	120	173	97						940
	Lain-Lainnya	44.415	33.566	63.569	24.604	41.428	39.440	54.396						301.418
	JUMLAH	90.064	81.349	114.559	72.915	120.685	84.298	124.568	-	-	-	-	-	752.578
	JUMLAH S/D	90.064	171.413	285.972	358.887	479.572	563.870	688.438	688.438	688.438	688.438	688.438	688.438	752.578

[illegible]

[illegible]



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center: +62 813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : *UM-208 / 1 / 1 / ST / 2025*

Jakarta, 9 September 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Ucapan Terima Kasih

Yth. Direktur Utama PT. Jasa Sarana

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan video series terkait angkutan publik terintegrasi, dimana salah satu episodenya diproduksi pada wilayah kerja Saudara, dapat kami sampaikan bahwa video dimaksud telah tayang melalui kanal resmi media sosial Kementerian Perhubungan (@kemenhub151) dengan judul Saatnya Tongkat Estafet BTS Beralih | Jelajah Moda Eps 2. Adapun video dapat diakses melalui tautan berikut <https://bit.ly/jelajahmoda2>

Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kerja sama, serta bantuan yang telah diberikan selama penyusunan video series dimaksud. Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut untuk mendukung penyebaran informasi dan pemanfaatan transportasi umum kepada masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Ernita Titis Dewi
NIP. 197607102006042001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center: +62 813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : UM.208/1 / 5 / STJ / 2025

Jakarta, 9 September 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Ucapan Terima Kasih

Yth. Direktur Utama Transjakarta

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan video series terkait angkutan publik terintegrasi, dimana salah satu episodenya diproduksi pada wilayah kerja Saudara, dapat kami sampaikan bahwa video dimaksud telah tayang melalui kanal resmi media sosial Kementerian Perhubungan (@kemenhub151) dengan judul BTS Mengubah Peradaban | Jelajah Moda Eps 1. Adapun video dapat diakses melalui tautan berikut <https://bit.ly/jelajahmoda1>

Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kerja sama, serta bantuan yang telah diberikan selama penyusunan video series dimaksud. Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut untuk mendukung penyebaran informasi dan pemanfaatan transportasi umum kepada masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Ernita Titis Dewi
NIP. 197607102006042001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center: +62 813-111111-05

TLX. : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : UM-209 / 11 / B / STJ / 2025

Jakarta, 3 September 2025

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Narasumber

Yth. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia
Kantor Cabang Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah di sektor transportasi, salah satunya terkait Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, yang kembali melayani penerbangan internasional, Kementerian Perhubungan melalui Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) berencana melaksanakan kegiatan peliputan pada Jumat, 5 September 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Saudara untuk menjadi Narasumber kegiatan dimaksud serta apabila memungkinkan kiranya dapat disertakan pula data pendukung. Untuk komunikasi lebih lanjut, bertindak selaku narahubung kegiatan Saudari Hafsari Aceh melalui nomor *WhatsApp*: 0822 1932 1717.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

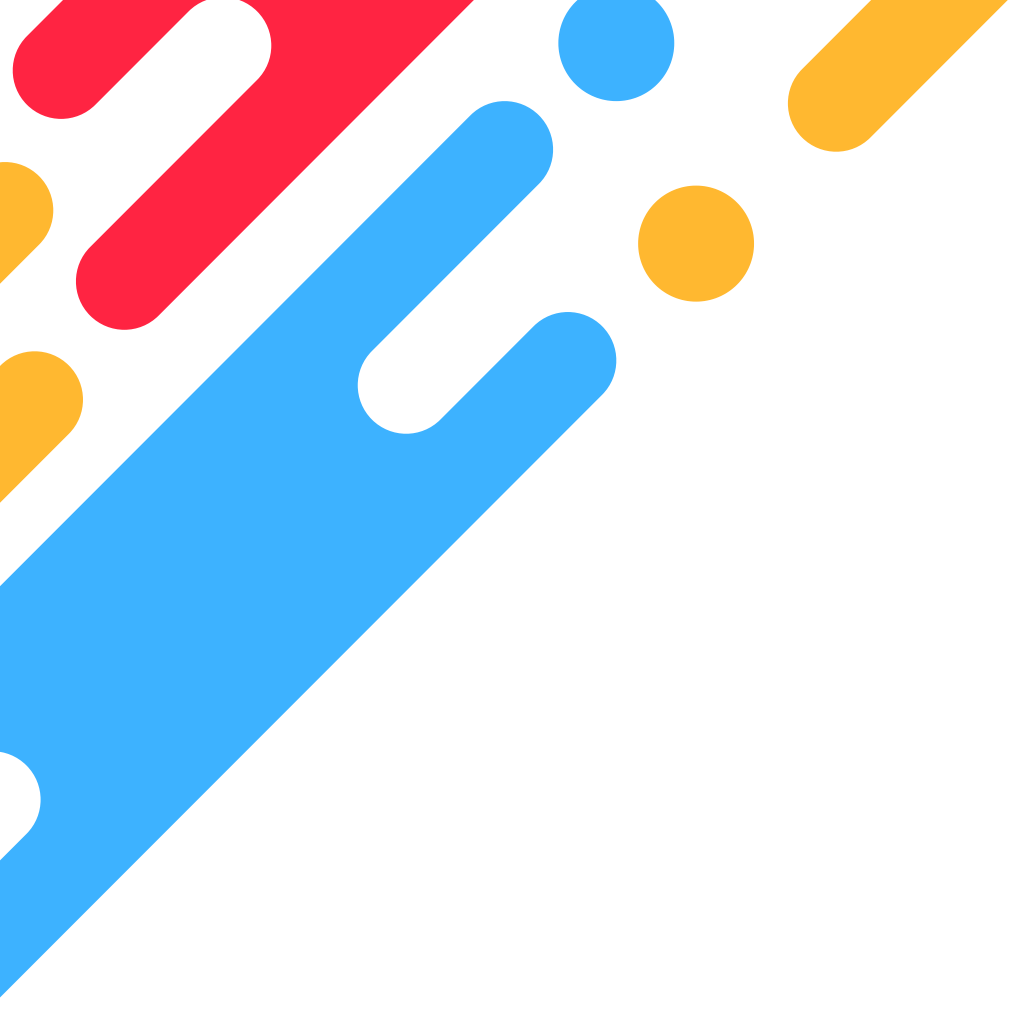


Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik,

Ermita Titis Dewi
NIP. 19760710 200604 2 001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.



2025

SURAT MASUK

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Telepon (021) 72797848

Nomor : UM 0102-Ks/1230
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lampiran
Hal : Penyampaian Informasi Pengumuman Seleksi
Pengurus LPJK Periode 2025-2029

Jakarta, 21 Mei 2025

Yth. Daftar Terlampir
di tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Pengurus LPJK Periode 2025-2029 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, maka bersama ini dengan hormat kami Informasikan Pengumuman Seleksi Pengurus LPJK Periode 2025-2029 Nomor 11/PENG/PANSEL-LPJK/2025 tanggal 19 Mei 2025 (terlampir).

Sesuai dengan pedoman seleksi pengurus LPJK yang telah kami unggah pada *website* <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>, batas waktu pendaftaran dan penyampaian dokumen persyaratan dengan cara mengunggah kelengkapan dokumen melalui *website* dapat dilakukan paling lambat **sampai dengan tanggal 10 Juni 2025 pukul 23.59 WIB**. Adapun Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui *Website* <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus> atau menghubungi Email seleksi.lpjk@pu.go.id dan/atau *Call Center* seleksi pengurus LPJK (081319431331).

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Indro Pantja Pramodo
NIP.197104052001121001
Tanda Tangan Elektronik

Tembusan:

1. Dr. Dadang Rukmana, S.H., CES., DEA, selaku Ketua Pengarah Panitia Seleksi Pengurus LPJK Periode 2025-2029.
2. Ir. Abdul Muis, M.T., selaku Anggota Pengarah Panitia Seleksi Pengurus LPJK Periode 2025-2029.
3. Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg., Anggota Pengarah Panitia Seleksi Pengurus LPJK Periode 2025-2029.
4. Prof. Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D – Ketua Kelompok Kerja Penilai Pengurus LPJK Periode 2025-2029.



Pengecekan Keaslian Dokumen

LAMPIRAN I

Nomor : UM 0102-Ks/1230
Tanggal : 21 Mei 2025

D. Institusi Pengguna Jasa Konstruksi Pemerintah

1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Kementerian Kebudayaan
6. Kementerian Perhubungan
7. Kementerian Perindustrian
8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
9. Kementerian Desa
10. Kementerian Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia
11. Kementerian Kelautan Dan Perikanan
12. Kementerian Kesehatan
13. Kementerian Pertanian
14. Kementerian Pemuda dan Olahraga
15. Kementerian Komunikasi dan Digital
16. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
17. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
18. Kementerian Keuangan
19. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
20. Kementerian Ketenagakerjaan
21. Kementerian Dalam Negeri
22. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
23. Kementerian Perdagangan
24. Badan Pusat Statistik (BPS)
25. Kementerian Hukum
26. Kementerian Hak Asasi Manusia
27. Kementerian Investasi dan hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
28. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
29. Badan Standardisasi Nasional (BSN)/ Komite Akreditasi Nasional (KAN)
30. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
31. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk
32. PT. Amarta Karya (Persero)
33. PT. Brantas Abipraya (Persero)
34. PT. Hutama Karya (Persero)
35. PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk
36. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
37. PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk
38. PT. Nindya Karya (Persero)
39. PT. Indah Karya (Persero)
40. PT. Bina Karya (Persero)
41. PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)
42. PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
43. PT. Agrinas Palma Nusantara (Persero)
44. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
45. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)



**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
JOHOR BAHRU**

No. 46, Jalan Taat, 80100, Johor Bahru, Malaysia
Telp: (+607)2274118, 2213241, 2213243, 2213245
Fax: (+607) 2274288, 2213246

Kepala Perwakilan RI

Sigit S. Widiyanto
Konsul Jenderal

BERITA BIASA

Nomor : **B-00243/Johor Bahru/250606**
Kepada Yth. : Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala Kepolisian RI, Dubes RI Kuala Lumpur; Kepala BAKAMLA RI
U.p. Yth. : Dir Pelindungan WNI; Dir Asia Tenggara; Kadivhubinter, Polri; Direktur Kerja Sama, BAKAMLA; Kepala Zona BAKAMLA Barat; Kapolda Kepri
Info Yth. : Dirjen Protkons; Dirjen Aspasaf; Dirjen Perhubungan Laut, Kemhub; Dir. Polairud, Polda Kepri; Keppris se-Malaysia
Dari : Kepala Perwakilan RI Johor Bahru
Jumlah : **5 (lima)** Halaman
Perihal : Penyerahan KM Tambisan Agensi beserta 3 (tiga) awak WNI Asal Pulau Buru dari Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia kepada KJRI Johor Bahru

Ringkasan Berita

Pada 27 Mei 2025, KJRI Johor Bahru menerima informasi terkait penangkapan sebuah kapal KM Tambisan Agensi yang diawaki oleh 3 (tiga) orang WNI oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) Negeri Johor. Penangkapan dilakukan pada 26 Mei 2025 di posisi Garis Lintang 01 derajat 13.480 menit utara dan garis bujur 103 derajat 34.008 menit timur. KM Tambisan Agensi dan 3 (tiga) awaknya ditangkap atas dugaan memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin. Namun, setelah pihak APMM meminta plotting lokasi penangkapan kepada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), kapal berada di wilayah TSS. Selanjutnya, pada 5 Juni 2025, pihak APMM menyerahkan 3 (tiga) awak KM Tambisan Agensi kepada KJRI Johor Bahru untuk dipulangkan ke Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, KJRI Johor Bahru memohon bantuan BAKAMLA RI dan otoritas terkait di Indonesia untuk dapat menjemput kapal KM Tambisan Agensi dan 3 (tiga) awaknya di perairan perbatasan RI-Malaysia (titik pertemuan/RV yang disepakati) pada kesempatan pertama.

Merujuk perihal tersebut pada pokok berita, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 27 Mei 2025, KJRI Johor Bahru menerima informasi terkait penangkapan sebuah kapal KM Tambisan Agensi yang diawaki oleh 3 (tiga) orang WNI oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) Negeri Johor. Penangkapan dilakukan pada 26 Mei 2025 di posisi Garis Lintang 01 derajat 13.480 menit utara dan garis bujur 103 derajat 34.008 menit timur.

2. Data – data 3 (tiga) awak kapal KM Tambisan Agensi adalah sebagai berikut:

- a. **Nama** : **Ahmad**
No. Paspor : E 6057436
Tempat, Tgl & lahir : Buru Karimun, 26 Juni 1986
Alamat : Kel. Lubuk Puding, Kec. Pulau Buru, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau
- b. **Nama** : **Haryanto**
No. Paspor : C 1328283
Tempat, Tgl & lahir : Buru Karimun, 13 November 1993
Alamat : Kel. Lubuk Puding, Kec. Pulau Buru, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau
- c. **Nama** : **Muhammad Faizal**
No. Paspor : E 1748476
Tempat, Tgl & lahir : Buru Karimun, 30 Oktober 2000
Alamat : Kel. Buru, Kec. Pulau Buru, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau

3. Kronologis kasus sebagai berikut:

- Kapal KM Tambisan Agensi beserta 3 awak kapal WNI an. Ahmad, Haryanto dan Muhammad Faizal ditangkap oleh APMM Johor di perairan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia pada tanggal 26 Mei 2025 sekitar pukul 7 pagi;
 - 3 awak kapal WNI berangkat dari Pulau Buru, Tanjung Balai Karimun pada 25 Mei 2025 (sore hari) untuk menjual barang-barang (makanan dan minuman) ke kapal yang melewati jalur TSS;
 - Sdr. Ahmad bekerja menjual barang-barang ke kapal yang melewati TSS sejak tahun 2006, sedangkan Sdr. Haryanto dan Sdr. Muhammad Faizal baru saja bekerja membantu Sdr. Ahmad. Dari penjualan barang-barang diperoleh keuntungan sebesar Rp100.000 s.d. Rp400.000,- per harinya;
 - Kapal KM Tambisan Agensi yang digunakan untuk menjual barang-barang adalah milik Sdr. Ahmad. Kapal tersebut menggunakan mesin Mitsubishi 4d30 yang bisa mencapai kecepatan 8 knot.
4. Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh APMM Johor, penangkapan dilakukan atas dugaan kapal KM Tambisan Agensi telah memasuki wilayah perairan Malaysia. Namun, setelah pihak APMM meminta plotting lokasi penangkapan kepada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), kapal berada di wilayah TSS.
5. Selanjutnya pada 5 Juni 2025, pihak APMM menyerahkan kapal KM Tambisan Agensi beserta 3 (tiga) awaknya kepada KJRI Johor Bahru untuk dipulangkan ke Indonesia. Saat ini 3 (tiga) awak kapal berada di Tempat Tinggal Sementara KJRI Johor Bahru, sedangkan kapal KM Tambisan Agensi berada di jetty APMM Sungai Pulai.
6. Menindaklanjuti kasus tersebut, KJRI Johor Bahru meminta pihak APMM Negeri Johor untuk dapat mengawal kapal KM Tambisan Agensi beserta 3 (tiga) awak kapalnya ke perairan perbatasan Malaysia - Indonesia untuk selanjutnya diserahkan/dijemput oleh otoritas terkait di Indonesia.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, KJRI Johor Bahru memohon bantuan BAKAMLA RI dan otoritas terkait di Indonesia untuk dapat menjemput kapal KM Tambisan Agensi dan 3 (tiga) awaknya di titik pertemuan (RV) yang disepakati pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Petugas Komunikasi



Wagino

Pembuat Berita



Dhania Afini Lestari
Pelaksana Fungsi Konsuler 3

Dokumentasi KM Tambisan Agensi beserta 3 (tiga) awak WNI Asal Pulau Buru

1. Serah Terima 3 (tiga) Awak Kapal KM Tambisan Agensi kepada KJRI Johor Bahru



2. Kapal KM Tambisan Agensi





**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
PARIS**

47-49 rue Cortambert, 75116 Paris, France Tel. +33 145030760

Fax. +33 145045032 Email: paris.kbri@kemlu.go.id

☒ **SEGERA**
☒ **SANGAT SEGERA**
☐ **KILAT**

Kepala Perwakilan R.I.

Mohamad Oemar
Duta Besar LBBP

BERITA BIASA

Nomor : B-00264/Paris/250718
Kepada Yth. : Menlu, Menhub, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan
U.p. Yth. : Dirjen Amerop, Sahli DE - **Kemlu**; Dirjen Perkeretaapian - **Kemhub**;
Deputi Infrastruktur, Deputi Pembiayaan & Investasi Pembangunan - **Bappenas**; Dirjen Anggaran, Dirjen SEF - **Kemenkeu**
Info Yth. : Wamenlu, Dir Eropa I - **Kemlu**; Wamen Bappenas; Dir Prasarana - **Kemhub**; Dubes RI Den Haag
Dari : Duta Besar RI Paris
Jumlah : 3 Halaman
Perihal : Diskusi Proyek LRT Bandung antara Dirjen Perkeretaapian dengan
Penasihat Diplomatik Kementerian Perencanaan Daerah &
Desentralisasi Prancis, 16 Juli 2025

Ringkasan Berita

Pada 16 Juli 2025, Dirjen Perkeretaapian Kemhub RI telah melakukan pertemuan dengan Penasihat Diplomatik Kementerian Perencanaan Daerah & Desentralisasi Prancis, untuk membahas rencana proyek LRT Bandung dengan opsi skema pendanaan Prancis. Rencananya, Menteri Perhubungan RI dan Prancis akan melakukan pertemuan pada akhir Juli 2025. Dimohon kiranya Pusat dapat memberikan informasi perkembangan rencana proyek kerja sama RI-Prancis pada LRT Bandung.

Merujuk perihal pada pokok berita, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 16 Juli 2025, KBRI Paris mendampingi pertemuan Dirjen Perkeretaapian Kemhub RI, Bapak Allan Tandiono, dengan Penasihat Diplomatik Kementerian Perencanaan Daerah dan Desentralisasi Prancis, Joël Hamann. Turut hadir dalam pertemuan perwakilan dari Kementerian Ekonomi, Keuangan, Kedaulatan Industri dan Digital Prancis; Kementerian Trasisi Ekologi dan Kohesi Teritorial Prancis; dan Atase Perhubungan RI di KBRI Den Haag.
2. Beberapa poin pembahasan dalam pertemuan tersebut antara lain:
 - a. LRT Bandung merupakan proyek strategis untuk menjawab kebutuhan mobilitas warga Bandung, terutama sebagai penghubung antara pusat kota dengan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang terletak di pinggiran kota.
→ Pihak Prancis menyampaikan antusiasme untuk terlibat dalam proyek dan menilai proyek LRT Bandung selaras dengan misi Prancis dalam pengembangan transportasi publik berkelanjutan dan pengurangan emisi. Prancis, yang memiliki

pengalaman panjang dalam sistem LRT dan HSR, siap mendukung baik pada tingkat pemerintah maupun perusahaan seperti Alstom, Sistra, dan Egis.

- b. Terkait skema pendanaan, kedua pihak berpendapat bahwa kesepakatan kerja sama antar-pemerintah (G2G) menjadi pilihan yang lebih sesuai dibandingkan skema *Public Private Partnership* (PPP). Skema G2G dapat mencakup kombinasi dari:
 - i. *Grant* (hibah) untuk pendanaan awal studi kelayakan (*Feasibility Studies* - FS atau pre-FS),
 - ii. *Soft loan* terikat (*tied aid*) untuk komponen proyek dengan kandungan Prancis seperti *rolling stock*,
 - iii. *Soft loan* tidak terikat (*untied aid*) dari AFD untuk infrastruktur yang mengandung komponen lokal,
 - iv. Potensi dukungan Uni Eropa untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek.
 - c. Dibahas pula penggunaan skema PPP sebagai opsi pendanaan. Namun pada proyek-proyek sebelumnya, skema tersebut menghadapi kesulitan mengingat adanya keharusan pengenaan tarif yang terjangkau oleh masyarakat, sehingga menyulitkan minat investor swasta karena rendahnya imbal hasil.
 - d. Surat dari Gubernur Jawa Barat dan dukungan resmi dari Menteri Perhubungan telah dikirimkan ke Bappenas untuk memastikan proyek LRT Bandung dapat dimasukkan sebagai proyek prioritas pendanaan (*Blue Book*). Setelah proyek LRT Bandung mendapatkan kepastian skema pendanaan, maka proyek tersebut akan dimasukkan dalam proyek pendanaan (*Green Book*).
 - e. Proyek LRT Bandung akan dikelola oleh Kementerian Perhubungan sebagai pemilik proyek (*project owner*), sedangkan *loan agreement* akan ditandatangani oleh Kementerian Keuangan.
→ Hal ini sejalan dengan praktik pada proyek sebelumnya seperti *Surabaya Regional Railway Line* (SRRL) yang didanai oleh KfW (Jerman).
 - f. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi. Dengan melibatkan mitra internasional seperti Prancis, Pemri berharap tata kelola proyek akan lebih profesional dan berorientasi pada hasil. Hal ini disambut positif oleh Prancis, yang juga memberlakukan standar anti-graft dalam semua skema pendanaan.
 - g. Langkah awal yang disepakati adalah penyusunan pre-FS/FS yang akan dibiayai melalui hibah dari pemerintah Prancis. Konsultan yang diusulkan pihak Prancis adalah Sistra dan Aegis, keduanya telah berpengalaman di Indonesia (LRT Jakarta dan Palembang).
→ Pihak Indonesia menyatakan tidak keberatan dengan alternatif tersebut, karena keduanya kompeten dan sudah memahami konteks lokal.
3. Untuk menindaklanjuti pertemuan, rencananya Menteri Perhubungan RI akan berkunjung dan melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Prancis di Paris pada akhir bulan Juli 2025.

Catatan:

4. KBRI Paris menyambut baik rencana proyek pembangunan LRT Bandung sebagai salah satu solusi transportasi massal yang modern, efisien, dan ramah lingkungan, serta diharapkan akan membawa dampak positif yang besar bagi mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
5. KBRI Paris juga menyambut baik rencana kerja sama dengan Prancis dalam pelaksanaan proyek mengingat untuk menghadirkan teknologi dan keahlian yang diperlukan di bidang transportasi, sekaligus juga untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis, khususnya dalam sektor infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Kiranya perlu dipastikan agar kerja sama tersebut dilakukan sejalan

dengan kepentingan dan prioritas pembangunan nasional serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

6. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Pusat dapat memberikan informasi atau pembaruan terkini mengenai perkembangan dan kemajuan proyek tersebut, dalam rangka memudah fasilitasi dan diskusi lebih lanjut dengan pihak Prancis.

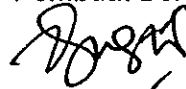
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Paris, Juli 2025

Petugas Komunikasi


Fathur Rohman

Pembuat Berita


Yustina Devanohi Prasadja
Counsellor

Business Visit Letter for Rail Transit Cooperation

Dear Dudy Purwagandhi,

I hope this email finds you well. On behalf of China Railway Materials Track Technology Service Group Co., Ltd., I am honored to extend our warmest congratulations on your recent appointment as Minister of Transportation. We also convey our sincere regards to you and your esteemed ministry.

China Railway Materials Track Technology Service Group Co., Ltd. (referred to as "Track Technology Service Group") is one of the wholly-owned subsidiaries of China Railway Materials Co., Ltd., a listed company controlled by China Logistics Group Co., Ltd., which is a state-wholly-owned enterprise directly supervised by SASAC of the State Council. The company focuses on comprehensive technical services, material supply, intelligent operation and maintenance together with international business cooperation in the field of rail transit. It has always been committed to providing efficient, safe and innovative solutions for the global rail transit industry, and has successfully implemented major projects in many countries and regions, such as the world-famous Djakarta to Bandung High-Speed Railway Project of Indonesia, China-Laos Railway Project, East Coast Railway Project of Malaysia, etc.

As an important economy in Southeast Asia, Indonesia has made remarkable achievements in the field of transportation infrastructure in recent years. We highly commend the visionary leadership and dedicated efforts of your esteemed government in advancing railway and urban rail transit initiatives. It is our earnest desire to engage in deeper dialogue with your ministry on rail transit construction, foster long-term cooperative partnerships, and collectively drive the sustainable growth of Indonesia's rail sector.

To this end, we kindly request a visit from April 21, 2025 to April 25, 2025 to meet with you and your team to discuss grinding and comprehensive maintenance service for railway tracks, technical services for supervision of railway product manufacturing, and integrated supply of railway materials. The visit time can be completely matched to your schedule, and the estimated duration is approximately 2 hours.

Here is the list of our delegation members:

Peng Shan: General Manager, Headquarters

Ruizhi Zhang: Director of Business Development Department, Headquarters

Yingping Li: General Manager, Operation and Maintenance Technology Co., Ltd

Hanguang Zhou: General Manager, South Central Branch

Jijun Gong: Technical Manager, Operation and Maintenance Technology Co., Ltd

For additional materials or any questions, please feel free to contact us. Thank you for your attention and consideration to this request. Wish you success in your work and a prosperous transportation industry in Indonesia!

We look forward to contributing to Indonesia's rail transit advancement and the honor of your favorable reply.

Sincerely,

China Railway Materials Track Technology Service Group Co., Ltd
Address: 16/F, Tower A, Dingxing Building, Building 2, Yard 5, Fenghuang Zui Street,
Fengtai District, Beijing, 100073, P.R. China.
Website: <https://gdjt.crmsc.com.cn/>

Contact Information:

Essy Patricia TEL: +62-83161645812
Yanling Wang Email: 710865143@qq.com

Mr.
Dudy PURWAGANDHI
Minister of Transportation
Ministry of Transportation
Indonesia

January 2025

Invitation to the International Transport Forum's 2025 Summit
Transport Resilience to Global Shocks
Leipzig, Germany, 21-23 May 2025

Dear Minister,

Chile has the honour of holding the 2024-2025 Presidency of the International Transport Forum (ITF), and in this capacity, I am delighted to invite you to the ITF's next annual Summit on enhancing *Transport Resilience to Global Shocks* which will be held from 21 to 23 May 2025 in Leipzig, Germany.

The ITF Summit is the world's largest gathering of transport ministers and the premier global transport policy event. Since 2008, ministers, heads of international organisations, parliamentarians, and leaders in industry and academia have met annually during the 2.5-day Summit to discuss the future of transport and mobility through the prism of a strategic topic of global importance.

This year, participants will reflect and share perspectives on how to ensure the continuity of transport systems amidst disruptions such as natural disasters, pandemics, cyber-attacks, and geopolitical crises. Discussions will centre on policies for adapting to, mitigating and recovering from these shocks, with an emphasis on transforming systems into more sustainable and resilient networks.

The 2025 Summit offers a diverse range of sessions featuring high-level speakers and engaging panellists. I particularly hope you will join the annual Open Ministerial session, to be held on 22 May from 11:15 to 12:45, where ITF member ministers, guest ministers and industry leaders will gather to explore how cooperation between the public and private sectors can bolster transport systems' resilience. More information to facilitate your participation will follow.

The event will also provide diverse opportunities for you to meet your peers in government and high-level representatives of ITF stakeholders in industry and civil society. The ITF Secretariat will be pleased to help you arrange bilateral meetings, technical visits, media conferences and other events to make your participation in the Summit stimulating and productive.

Please mark the 2025 Summit in your calendar. I am counting on your active presence at this key event for transport ministers, so that together we can build a forward-thinking vision for transport and mobility in an increasingly uncertain world.

I look forward to hearing from you and seeing you personally in Leipzig in May.

Yours sincerely,



Juan Carlos MUÑOZ ABOGABIR
Minister of Transport and Telecommunications
Republic of Chile



UNITED NATIONS CENTRE FOR REGIONAL DEVELOPMENT

Nagono 1-47-1, Nakamura-ku, Nagoya 450-0001, Japan
Tel: (+81-52) 561-9377 Fax: (+81-52) 561-9374

22 May 2025

Subject: Proposal for hosting the High-level 17th Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia in 2025/2026

Excellency,

First of all, we would like to express our sincere gratitude and appreciation to the Government of Indonesia for its continued participation and valuable contribution to the High-level Intergovernmental Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia since its inception. The intention of this communication is to formally request the Ministry of Transportation (MoT), Government of Indonesia, to kindly consider hosting the High-level 17th Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia, 2025/2026 in Indonesia. The Forum will be co-organized by the Ministry of the Environment, Government of Japan, Asian Development Bank (ADB) and the United Nations Centre for Regional Development of Division for Sustainable Development Goals, Department of Economic and Social Affairs (UNCRD-DSDG/UN DESA).

Taking this opportunity, we wish to extend our sincere appreciation to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia, for its remarkable progress achieved under your visionary leadership in the transport sector. We acknowledge the Government of Indonesia for its strong commitment to climate action, the pursuit of net-zero emissions by 2060, and the integration of the Sustainable Development Goals (SDGs) into national transport policies and strategies. The Ministry of Transportation has demonstrated remarkable leadership through a forward-looking and holistic approach that prioritizes green financing, electrification of transport, and inclusive urban mobility. These efforts are instrumental in shaping a low-carbon, resilient, and sustainable future for Indonesia's transport sector.

Indonesia has been making significant advancements toward achieving net-zero emissions in the road transport sector by focusing on a combination of policies, technological innovations, and infrastructure development. We recognize a number of noteworthy initiatives of Indonesia such as the National Electric Vehicle Roadmap (2020-2030), improvement in public transport infrastructure to reduce reliance on private vehicles, in particular, the Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) and Light Rail Transit (LRT) systems, Green Freight and Logistics Initiatives, including railways and sea transport, development of green corridors and eco-friendly road infrastructure practices, promotion of non-motorized transport in cities like Bandung and Jakarta, renewable energy for charging stations such as solar-powered charging stations, among others.

We are further impressed with the ambition to expand the railways network to over 10,500 kilometers by 2030, including major projects like the Jakarta-Bandung high-speed rail and Trans-Sulawesi Railway is strengthening national connectivity, reducing dependence on road transport, and supporting economic diversification.

H.E. Dudy Purwagandhi
Minister
Ministry of Transportation, Government of Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10110, Indonesia
Email: info151@dephub.go.id

In this regard, a Forum in Indonesia could provide many meaningful learning objectives to other member countries and international community from its vast experience and technical knowhow in the areas of sustainable transport. As an integral component of the 17th EST Forum, we would also like to propose a “Indonesia Transport Day” be held on Day 1, with a focus on low-carbon, climate resilient and high-quality transport infrastructure and service development. It would also serve as an opportunity to share best practices and inspire enhanced regional collaboration. Furthermore, the outcomes of the 17th Regional EST Forum in Asia could serve as a meaningful regional input to the international processes associated with the UN Decade of Sustainable Transport (2026–2035).

To this end, UNCRD respectfully requests the Ministry of Transportation to kindly consider hosting the High-Level 17th Regional EST Forum in Asia. We would also like to confirm, Your Excellency, the standard cost-sharing arrangements between the Host Country and the United Nations as outlined below:

Host Country Responsibilities:

Cover all local logistics (excluding airfare and hotel accommodation for international participants), including the meeting venue and related costs for approximately 400 to 500 attendees; provide meeting supplies and stationery for all meeting days; organize a welcome reception, arrange networking lunches provide tea/coffee for all meeting days, facilitate airport transfers for Ministers and VIPs, including establishing a Conference Information Desk at the international airport to welcome and assist all foreign participants; arrange a professional photographer and organize a technical field trip for international participants to showcase Indonesia’s best practices and achievements.

UNCRD Responsibilities:

Cover airfare, hotel accommodation (through provision of per-diem) and standard terminal expenses for all foreign delegates, and officials from the 25 EST countries, international experts and resource persons; take overall substantive responsibility for organizing the Forum, including the preparation of the draft concept note and programme agenda; selection of international speakers and resource persons; coordination and liaison with member countries, UN agencies, international organizations, academia, NGOs and the private sector; issuance of official invitations and registration management; prepare all substantive background papers/policy discussion documents, and other necessary meeting materials, including the preparation of the Chair’s Summary- the Forum outcome document and ensure their dissemination worldwide.

Usually, the Forum is attended by 400~500 participants as Indonesian delegation has kindly witnessed previously (with a possible breakdown of around 200 international participants and 200-300 domestics participants). More details about the Forum, including the Aichi 2030 Declaration (2021-2030) on EST could be found at: <https://uncrd.un.org/content/regional-est-forum>

Please accept, Excellency, the assurances of highest consideration.

Sincerely Yours,

村田重雄
MURATA Shigeo

Head,

United Nations Centre for Regional Development

CC:

Dr. Capt. Antoni Arif Priadi
Secretary General
Ministry of Transportation, Government of Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10110, Indonesia
Email: Antoni.kemenhub@gmail.com; info151@dephub.go.id

Mr. Risyapudin Nursin
Director General of Land Transportation
Ministry of Transportation, Government of Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10110, Indonesia
Email: ditjenhubdat@kemenhub.go.id; info151@dephub.go.id

Choudhury Rudra Charan Mohanty,
Environment Programme Coordinator,
United Nations Centre for Regional Development (UNCRD)- DSDG/UN DESA,
1-47-1 Nagono, Nakamura-ku, Nagoya - 450-0001, Japan
Tel: (81)-52-561-9417
Fax: (81)-52-561-9375
Email: mohantyc@uncrd.or.jp / choudhury.mohanty@un.org



Nomor : KJ.209/III/5/KA-2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : —

19 Maret 2025

Yth.
Bapak Menteri Perhubungan RI
di
Tempat

Perihal : Permohonan Dukungan Terlaksananya Kontrak Penyelenggaraan Kereta Api PSO, LRT Jabodebek dan Kereta Api Perintis Tahun Anggaran 2025

1. Menunjuk :

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2025;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 175 Tahun 2024 Tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggaraan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025;
- c. Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI Nomor KA.204/I/24/DJKA/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO), Subsidi Kereta Api Ringan terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) dan Angkutan Perintis TA 2025 ("**Surat DJKA 23 Desember 2024**").

2. Berdasarkan hal tersebut di atas bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Guna menjaga kesinambungan pelayanan angkutan kereta api dan selaras dengan Surat DJKA 23 Desember 2024 yang menyampaikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**PT KAI**") agar tetap menjalankan kereta api penugasan pemerintah bersamaan dengan proses penandatanganan kontrak, PT KAI telah mengoperasikan kereta api penugasan Pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2025, sebagai berikut:
 - i. Kereta Api PSO yang meliputi ka jarak jauh, jarak sedang, jarak dekat, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, dan KRL YIA;
 - ii. Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (LRT Jabodebek);

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

- iii. Kereta Api Perintis yang meliputi Kereta Api Cut Mutia, Lembah Anai, LRT Sumsel, Bathara Kresna, Amir Hamzah, dan Nurmala.
- b. Sehubungan dengan sampai saat ini belum ada kontrak penyelenggaraan angkutan Kereta Api PSO dan Kereta Api Perintis Tahun Anggaran 2025, maka proses penagihan sampai dengan pencairan atas biaya penyelenggaraan yang telah dikeluarkan PT KAI belum dapat dilakukan. Hal ini berpotensi mengganggu kinerja keuangan atas pembiayaan operasional Kereta Api PSO, LRT Jabodebek, dan Kereta Api Perintis yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan baik pada aspek keselamatan, keamanan, kehandalan, dan kenyamanan dalam pengoperasian kereta api sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan RI.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon perkenaan dukungan Bapak Menteri atas terlaksananya penandatanganan kontrak penyelenggaraan Kereta Api PSO Tahun Anggaran 2025 dan kontrak penyelenggaraan Kereta Api Perintis Tahun Anggaran 2025.
4. Demikian kami sampaikan dan atas perkenan Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih.

PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Kantor Pusat



DIDIEK HARTANTYO
Direktur Utama

Tembusan Eksternal:

1. Direktur Jenderal Perkeretaapian - Kementerian Perhubungan RI
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI
3. Kasubdit Angkutan - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : T/1743/PC.01.02-K5/VII/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Data dan Informasi

02 Juli 2025

Yth.

Menteri Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pencegahan Maladministrasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman melalui Keasistenan Utama V melakukan kajian sistemik dengan judul *"Pengawasan Program Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap"*. Terkait dengan hal tersebut, kami bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka permintaan data dan informasi (kerangka acuan kegiatan terlampir) pada:

hari, tanggal : Selasa, 15 Juli 2025
waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Kantor Kementerian Perhubungan

Mengingat pentingnya agenda dimaksud, kami berharap Menteri Perhubungan dapat menugaskan pejabat yang berkompeten untuk menerima Tim Ombudsman dalam kegiatan tersebut dengan menyiapkan data/dokumen terkait dengan kajian. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Asisten Ombudsman a.n. Sdr. Irsalina di nomor telepon +628119063737.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia,



Dr. Hery Susanto, S.Pi., M.Si.



22 Januari 2025

Nomor. : 036/UND/GPFE-FRC/I/2025
Perihal : **Undangan Pembukaan & Seminar pada
10th Government Procurement Forum and Expo 2025**

Kepada Yth.
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Di Tempat

Dengan hormat,
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terimakasih.
Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan tugas sehari-hari. Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran serta dan dedikasi Bapak/Ibu dalam mengembangkan ekosistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Dengan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam transformasi digital dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, kami dengan bangga menghadirkan kembali Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2025. Mengusung tema "Revolusi Pengadaan Melalui Digitalisasi: Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan," rangkaian agenda GPFE 2025 telah kami sempurnakan agar dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi Bapak/Ibu dan penyedia untuk menjalin kolaborasi strategis, serta mendukung pencapaian target pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif dan efisien.

Expo dan forum nasional GPFE 2025 akan digelar pada 23-25 Juli 2025 di Jogja Expo center, Yogyakarta, dengan rangkaian agenda sebagai berikut:

- Expo Penyedia Terbaik
- Seminar
- Diskusi Panel
- B2G & B2B Business Matching

Selain itu, peserta akan mendapatkan akses langsung ke berbagai informasi terkini dari para ahli di bidang pengadaan serta perkembangan teknologi yang mendukung transparansi dalam pengadaan.

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dan berpartisipasi dalam forum ini untuk tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga memperluas jaringan dan kesempatan berkolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan pengadaan yang lebih efisien dan berdaya saing.

Atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih.

Pendaftaran melalui <https://linktr.ee/GPFE.EVENT> , Informasi lebih lanjut terkait agenda dan pendaftaran dapat menghubungi panitia melalui <wa.me/628129991037>.

Hormat Kami,

Ruslim M.Si
Ketua Panitia Pelaksana
GPFE 2025



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : HK.00/5.7.117/MPO/V/2025 Jakarta, 7 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Perpres tentang
Perubahan Perpres No. 43 Tahun 2022

Kepada Yth. Bapak/Ibu Menteri/Kepala Lembaga (Daftar Terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang lebih efektif dan efisien di bidang kepemudaan dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan beserta lampiran Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Bapak/Ibu Menteri/Kepala Lembaga agar menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait dalam Rapat Koordinasi yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Mei 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Auditorium Wisma Kemenpora
Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Senayan, Jakarta Pusat
Agenda : *Kick Off* Pembahasan Rancangan Perpres tentang Perubahan
Perpres Nomor 43 Tahun 2022 dan lampiran RAN Pelayanan
Kepemudaan
Pimpinan Rapat : Menteri Pemuda dan Olahraga

Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Saudara Palelam Jopianto (081280193590) dan Saudari Syela Ernawati (085868462293).

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Menteri/Kepala Lembaga, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,



Ario Bimo Nandito Ariotedjo

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

Lampiran Surat Undangan
Nomor : HK.00/5.7.117/MPO/V/2025
Tanggal : 7 Mei 2025

DAFTAR MENTERI/KEPALA LEMBAGA YANG DIKIRIMI SURAT UNDANGAN

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
6. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Luar Negeri;
9. Menteri Sekretariat Negara;
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Menteri Lingkungan Hidup;
12. Menteri Koperasi;
13. Menteri Usaha Kecil dan Menengah;
14. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
17. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Menteri Agama;
19. Menteri Kesehatan;
20. Menteri Ketenagakerjaan;
21. Menteri Perindustrian
22. Menteri Perdagangan;
23. Menteri Pertahanan;
24. Menteri Hukum;
25. Menteri Hak Asasi Manusia;
26. Menteri Keuangan;
27. Menteri Kebudayaan;
28. Menteri Sosial;
29. Menteri Perhubungan;
30. Menteri Komunikasi dan Digital;
31. Menteri Kehutanan;
32. Menteri Transmigrasi;
33. Menteri Pariwisata;
34. Menteri Ekonomi Kreatif;
35. Menteri Pertanian;
36. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
37. Menteri Imigrasi;
38. Menteri Kelautan dan Perikanan;
39. Menteri Kependudukan/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
40. Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM;

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

41. Kepala Badan Pusat Statistik;
42. Kepala Perpustakaan Nasional;
43. Kepala Badan Narkotika Nasional;
44. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
45. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
46. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
47. Kepala Badan Informasi Geospasial;
48. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
49. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional);

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,



Ario Bimo Nandito Ariotedjo

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

Nomor : B/1482/KP.04.09/IX/2025 16 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Sosialisasi dan Diskusi Publik:
Peningkatan Pengawasan melalui
Transformasi Digital untuk Inovasi
Industri Pangan

Yth. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/
Kementerian/Lembaga/Lembaga Nonkementerian

(daftar terlampir)

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan inovasi industri pangan nasional, Ombudsman Republik Indonesia akan menyelenggarakan Sosialisasi dan Diskusi Publik: Peningkatan Pengawasan melalui Transformasi Digital untuk Inovasi Industri Pangan dengan menghadirkan narasumber dari berbagai Kementerian/Lembaga serta praktisi industri pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk menugaskan minimal 2 orang peserta yang terdiri dari unsur pengawas internal/Inspektorat pada unit kerja masing-masing, untuk hadir pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

hari : Selasa, 30 September 2025
pukul : 08.30 – 16.00 WIB
tempat : Ruang Aula Serbaguna lantai 1, Ombudsman Republik Indonesia

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Sosialisasi dapat disampaikan melalui Sdri. Laila Hayati (0821-5792-7147). Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Suganda Pandapotan Pasaribu

Lampiran Surat Undangan

Nomor : B/1482/KP.04.09/IX/2025

Tanggal : 16 September 2025

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/
KEMENTERIAN/LEMBAGA/LEMBAGA NONKEMENTERIAN**

No	Nama Instansi
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
2.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.	Mahkamah Agung Republik Indonesia
4.	Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia
5.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
6.	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
7.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
8.	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
9.	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
10.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
12.	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
13.	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
14.	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
15.	Kementerian Negara
16.	Kementerian Dalam Negeri
17.	Kementerian Luar Negeri
18.	Kementerian Pertahanan
19.	Kementerian Agama
20.	Kementerian Hukum
21.	Kementerian Hak Asasi Manusia
22.	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
23.	Kementerian Keuangan
24.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
25.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
26.	Kementerian Kebudayaan
27.	Kementerian Kesehatan
28.	Kementerian Sosial
29.	Kementerian Ketenagakerjaan
30.	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran
31.	Kementerian Perindustrian
32.	Kementerian Perdagangan
33.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
34.	Kementerian Pekerjaan Umum
35.	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
36.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
37.	Kementerian Transmigrasi
38.	Kementerian Perhubungan

No	Nama Instansi
39.	Kementerian Komunikasi dan Digital
40.	Kementerian Pertanian
41.	Kementerian Kehutanan
42.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
43.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
44.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
45.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
46.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
47.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
48.	Kementerian Lingkungan Hidup
49.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi
50.	Kementerian Koperasi
51.	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
52.	Kementerian Pariwisata
53.	Kementerian Ekonomi Kreatif
54.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
55.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
56.	Arsip Nasional Republik Indonesia
57.	Badan Ekonomi Kreatif
58.	Badan Gizi Nasional
59.	Badan Informasi Geospasial
60.	Badan Intelijen Negara
61.	Badan Karantina Indonesia
62.	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
63.	Badan Kepegawaian Negara
64.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
65.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
66.	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
67.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
68.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
69.	Badan Narkotika Nasional
70.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
72.	Badan Pangan Nasional
73.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
74.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
75.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
76.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
77.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
78.	Badan Pertanahan Nasional
79.	Badan Pusat Statistik
80.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
81.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
82.	Badan Siber dan Sandi Negara
83.	Badan Standardisasi Nasional
84.	Lembaga Administrasi Negara
85.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
86.	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

No	Nama Instansi
87.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
88.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
89.	Komisi Informasi
90.	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
91.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
92.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
93.	Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM
94.	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
95.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
96.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Batam/Bintan/Karimun/Sabang)
97.	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau
98.	Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
99.	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
100.	Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
101.	Komisi Informasi Pusat
102.	Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)
103.	Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
104.	Komnas HAM